

HASIL-HASIL PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PERSPEKTIFNYA PADA REPELITA VII

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

Jakarta, 19 Desember 1996

Sebelum Orde Baru, yaitu antara tahun '60 sampai dengan tahun '65, pembangunan walaupun ada, berjalan tersendat-sendat. Kondisi politik dalam negeri yang labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

I. Hasil-Hasil Pembangunan Nasional

Pada tahun 1965, perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras sangat tipis dan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga-harga membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang mencapai puncaknya sebesar 650 persen di tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan terus menerus bergejolak hingga pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI.

Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan bangsa di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prioritas: (1) pengendalian inflasi, (2) pencukupan kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan ekspor, dan (5) pencukupan kebutuhan sandang.

Setelah itu upaya pembangunan yang sistematis mulai dilaksanakan melalui serangkaian pembangunan lima tahunan dan berjangka dua puluh lima tahun berdasarkan arahan-arahan GBHN. Repelita I dalam PJP I dimulai pada tahun 1969/70. Agar pencapaian sasaran pembangunan dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan yang digariskan, maka sasaran-sasaran pembangunan dipilah dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Seluruh kebijaksanaan dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka Trilogi Pembangunan.

Melalui pelaksanaan pembangunan yang sistematis, berencana, bertahap dan konsisten, berbagai sasaran pembangunan telah dicapai tidak saja di bidang ekonomi tapi juga di semua bidang pembangunan lainnya seperti bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, agama, iptek, hukum, politik, dan hankam.

Bidang Ekonomi

Pada awal Repelita I, keadaan bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Indonesia termasuk salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US\$ 70.

Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu antara 2 - 3 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Jumlah penduduk miskin cukup besar, pada awal Repelita I mencapai 70 juta orang atau 60 persen dari seluruh penduduk.

Selama PJP I, laju pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6,8 persen dengan laju pertumbuhan penduduk telah dapat ditekan rata-rata di bawah 2 persen per tahun, sehingga pendapatan per kapita meningkat lebih dari 11 kali (dinyatakan dalam US\$ pada harga yang berlaku) menjadi di atas US\$ 800.

Dalam 27 tahun terakhir ini sebanyak 8 kali perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 8 persen. Dalam PJP I, jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 25,9 juta orang atau 13,7 persen dari seluruh penduduk. Upaya penanggulangan kemiskinan ini telah dilanjutkan dan ditingkatkan antara lain dengan tambahan program khusus seperti IDT dan sekarang dengan program Takesra/Kukesra.

Dalam dua tahun Repelita VI, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5 persen dalam tahun 1994 dan 8,1 persen dalam tahun 1995. Pertumbuhan itu telah melampaui sasaran (baru) yang ditargetkan dalam Repelita VI yaitu sebesar 7,1 persen rata-rata per tahun.

Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun dan pertumbuhan ekonomi seperti di atas, pendapatan nasional nominal per kapita telah mencapai US\$ 920 pada tahun 1994 dan US\$ 1.023 pada tahun 1995.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat seperti tersebut di atas diperoleh terutama atas dukungan dari pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Selama PJP I pertumbuhan sektor industri pengolahan rata-rata mencapai sekitar 12 persen per tahun, sedangkan dalam Repelita VI yang ditargetkan rata-rata sebesar 10,2 persen per tahun pada dua tahun pertama Repelita VI telah berhasil dilampaui yaitu masing-masing sebesar 12,5 persen dan 11,1 persen dalam tahun 1994 dan 1995 sehingga dalam kurun waktu sepuluh tahun sektor industri pengolahan telah berlipat 7 kali.

Pertumbuhan ekonomi disertai dengan perubahan struktur ekonomi yang makin seimbang dan kukuh seperti tercermin pada struktur produksi, struktur penerimaan devisa, struktur penerimaan negara, dan struktur ketenagakerjaan.

Pada awal PJP I, struktur produksi masih rentan dan didominasi oleh sektor pertanian. Pangsa sektor pertanian terhadap PDB hampir mencapai 50 persen sedangkan industri pengolahan di bawah 10 persen. Dalam tahun 1995, keseimbangan kedua sektor itu telah berubah yaitu pangsa sektor pertanian telah menurun menjadi 17,2 persen sedangkan pangsa sektor industri pengolahan meningkat menjadi 24,3 persen, sehingga tatanan perekonomian menjadi lebih kukuh.

Peranan sektor migas yang pada dekade 70-an mendominasi ekspor dan penerimaan negara mulai menurun sejak tahun 1981/82. Dalam tahun 1995/96, peran ekspor migas dalam total ekspor telah turun menjadi 22,0 persen dari puncaknya pada tahun 1982/83 sebesar 79,0 persen. Peran penerimaan negara yang berasal dari migas juga turun yaitu menjadi sebesar 20,8 persen, dari puncaknya pada tahun 1981/82 sebesar 70,6 persen.

Struktur tenaga kerja juga telah mengalami perubahan dan menuju ke arah yang makin seimbang. Pada tahun 1971, pekerja yang bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor lainnya adalah masing-masing 66,3 persen, 6,8 persen, dan 26,9 persen. Dalam tahun 1995, pekerja yang bekerja di sektor pertanian, industri, dan sektor lainnya telah berubah menjadi masing-masing 47,3 persen, 10,7 persen, dan 42,0 persen. (Angkatan kerja pada tahun 1971 berdasarkan usia penduduk di atas 10 tahun, dan pada tahun 1995 berdasarkan usia penduduk di atas 15 tahun).

Perubahan struktur yang menjadi semakin kuat dan seimbang tersebut tidak terlepas dari berkembangnya peranan sektor masyarakat dalam pembangunan, antara lain sebagai hasil berbagai kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang.

Berbagai kebijaksanaan tersebut telah mendorong peningkatan penanaman investasi swasta yang cukup tajam. Misalnya, nilai persetujuan yang berasal dari PMDN dan PMA dalam tahun 1995/1996 mencapai Rp 87,5 triliun dan US\$ 39,7 miliar atau naik sekitar 1,4 kali lipat dan 4,1 kali lipat dalam nilai nominal dibanding awal tahun 90-an.

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, konsumsi masyarakat juga meningkat yang salah satunya ditandai oleh laju peningkatan impor barang-barang konsumsi yakni sebesar 17,9

persen pada tahun 1994 dan 64,4 persen pada tahun 1995.

Dengan meningkatnya investasi dan pengeluaran konsumsi secara tajam dalam dua tahun terakhir, defisit transaksi berjalan meningkat. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US\$ 3,5 miliar pada tahun 1994/95 atau 2,0 persen dari PDB dan US\$ 6,9 miliar pada tahun 1995/96 atau 3,4 persen dari PDB terutama didorong oleh penanaman modal (asing) langsung. Upaya untuk mengendalikan terus dilakukan, agar defisit tersebut tetap dalam batas-batas yang aman.

Laju inflasi meskipun dapat dipertahankan "*single digit*", selama dua tahun Repelita VI masih di atas rata-rata target Repelita VI (5 persen) yaitu sebesar 9,2 persen dan 8,4 persen dalam tahun 1994 dan 1995. Dalam tahun 1996 ini diharapkan laju inflasi dapat ditekan lagi sehingga tidak lebih dari 7 persen.

B. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan

Pembangunan nasional tidak saja menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dan makin merata. Kebutuhan pokok rakyat telah tersedia secara meluas dengan harga yang mantap dan dalam jangkauan rakyat banyak.

Dalam PJP I kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada awal PJP I, angka harapan hidup baru mencapai rata-rata 45,7 tahun dan telah meningkat menjadi 63,5 tahun pada tahun 1995/96. Dalam periode yang sama, angka kematian bayi telah menurun dari 145 menjadi 55 per seribu kelahiran hidup.

Peningkatan kesejahteraan rakyat ditunjukkan pula oleh meningkatnya ketersediaan jumlah kalori makanan yang tersedia bagi penduduk Indonesia dari 2.035 kilokalori dalam tahun 1968 menjadi 3.055 kilokalori per kapita per hari pada tahun 1995. Penyediaan protein juga mengalami peningkatan yaitu dari 43,0 gram per kapita per hari pada tahun 1968 menjadi 69,2 gram per kapita per hari pada tahun 1995. Kedua indikator tersebut telah melampaui sasaran Repelita VI yang sebesar 2.150 kilokalori dan 46,2 gram per kapita per hari. Peningkatan rata-rata kalori dan protein ini juga mencerminkan peningkatan pendapatan rakyat banyak serta pemerataan pembangunan.

Keberhasilan di bidang pangan yang antara lain tercermin dari tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan diakui oleh FAO pada tahun 1985, telah meningkatkan kemampuan dalam penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Swasembada pangan ini akan terus dipertahankan secara dinamis didukung oleh upaya diversifikasi pangan.

Pada awal PJP I sampai dengan tahun kedua Repelita VI, ketersediaan beras per kapita per tahun meningkat dari 96,5 kg menjadi 150,9 kg; daging dari 2,7 kg menjadi 8,1 kg; telur dari 0,2 kg menjadi 3,3 kg; ikan dari 8,9 kg menjadi 19,4 kg.

Program wajib belajar enam tahun yang dicanangkan sejak tahun 1984 telah mencapai sasarannya sebelum PJP I berakhir. Angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat sekolah dasar meningkat dari 68,7 persen pada awal PJP I menjadi 111,9 persen pada tahun 1995/96; dari 16,9 persen menjadi 60,8 persen pada tingkat sekolah lanjutan pertama; dari 8,6 persen menjadi 35,9 persen untuk tingkat sekolah lanjutan atas; dan dari 1,6 persen menjadi 11,4 persen untuk tingkat pendidikan tinggi.

Keberhasilan program-program pendidikan ini juga ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta aksara dari 39,1 persen pada tahun 1971 menjadi 12,7 persen pada tahun 1995.

Hasil pendidikan ini bukan sekedar statistik. Peningkatan pendidikan akan meningkatkan pendapatan, apresiasi terhadap sekitarnya, kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah, serta membangun kualitas kehidupan bagi generasi berikutnya. Dewasa ini kita sedang memetik hasil dari pendidikan dalam PJP I, sambil menyiapkan pendidikan untuk generasi yang akan

datang.

Meningkatnya derajat pendidikan dan juga kesehatan mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas peranan wanita dalam pembangunan. Derajat pendidikan wanita dari tahun ke tahun terus meningkat yang ditunjukkan oleh makin banyaknya wanita yang menempuh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat SD jumlah murid wanita sudah hampir sama dengan murid laki-laki dengan rasio lebih dari 0.90. Pada tingkat SLTP, SLTA, dan PT rasio tersebut telah mencapai berturut-turut 0,89, 0,84, dan 0,63, dan terus meningkat. Demikian pula halnya dalam bidang kesehatan, misalnya angka harapan hidup (AHH) wanita bahkan lebih tinggi dari AHH laki-laki, yaitu sebesar 65,3 tahun pada tahun 1995/96 sedangkan AHH laki-laki yaitu sebesar 61,5 tahun.

Di bidang ekonomi, peningkatan peran wanita ditunjukkan dengan makin banyaknya pekerja wanita yang pada tahun 1990 berjumlah 25,5 juta orang meningkat menjadi 28,5 juta orang pada tahun 1995. Dengan kemajuan tersebut, maka peranan wanita di segala bidang pembangunan makin nyata. Dalam pembangunan perdesaan, misalnya, peran wanita melalui PKK sangat besar kontribusinya.

C. Bidang Agama

Agama mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan moral manusia Indonesia sebagai dasar membentuk manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, dukungan prasarana dan sarana peribadatan yang memadai memang diperlukan dalam upaya menjalankan kehidupan ibadah yang tenteram dan damai.

Sejak awal PJP I sampai dengan tahun 1995/96 telah dibangun mesjid, gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, Pura, dan Wihara oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat masing-masing sebanyak 600,3 ribu mesjid, 31 ribu gereja Protestan, 14 ribu gereja Katolik, 23,7 ribu Pura dan 4 ribu Wihara.

Walaupun sekali waktu dapat timbul ketegangan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa selama ini telah berhasil diciptakan suasana kehidupan antaragama yang rukun sehingga para pemeluk agama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenteram, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu dasar utama untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai upaya peningkatan teknologi terutama di bidang pertanian dan kesehatan telah membuahkan hasil selama PJP I dan dua tahun pertama Repelita VI telah membuahkan hasil. Keberhasilan lain yang dapat dicatat adalah meningkatnya kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam industri manufaktur, mulai dari industri dengan teknologi sederhana sampai industri canggih seperti pesawat terbang.

E. Bidang Hukum

Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai perbaikan di bidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Undang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain.

Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah.

Perbaikan aparatur hukum terus menerus dilakukan meskipun belum mencapai hasil yang

optimal, dan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat.

F. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Pembangunan politik selama PJP I dan dua tahun Repelita VI telah dapat mewujudkan tingkat stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan nasional yang menghasilkan kesejahteraan rakyat yang makin baik.

Pembangunan politik juga telah mendorong terciptanya iklim keterbukaan yang bertanggung jawab serta makin mantapnya pelaksanaan demokrasi Pancasila. Hal ini terutama dengan telah adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas berbangsa dan bernegara oleh seluruh organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, perlu dicatat pula perampingan organisasi peserta pemilu dari 10 peserta pada pemilu tahun 1971 menjadi 3 peserta.

Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, Indonesia telah memainkan peranan yang cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Antara lain patut dicatat peranan Indonesia di PBB, ASEAN, Gerakan Non Blok, dan APEC.

Dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan, kualitas dan kuantitas aparatur negara terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini juga dilakukan penataan organisasi Departemen dan lembaga Non Departemen.

Peningkatan kemampuan kegiatan penerangan, komunikasi, dan media massa (TV, radio, majalah, dan surat kabar) telah meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

G. Bidang Pertahanan Keamanan

Stabilitas keamanan di dalam negeri merupakan tulang punggung upaya pembangunan nasional. Dalam hal ini manunggalnya ABRI dengan rakyat dan mantapnya dwi fungsi ABRI merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan selama PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI sekarang ini.

Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan sesuai dengan Sishankamrata, dan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya.

II. Visi Pembangunan PJP II dan Repelita VII

Berdasarkan GBHN 1993, kata kunci dalam PJP II adalah **kemajuan, kemandirian**, dan peningkatan **kesejahteraan** rakyat. Untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan seperti yang diinginkan, berbagai kegiatan pembangunan harus tumbuh dan berkembang cepat dengan makin mengandalkan kemampuan sendiri. Titik berat pembangunan dalam PJP II terletak pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak pembangunan, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam PJP II, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 7 persen per tahun sedangkan laju pertumbuhan penduduk akan menjadi di bawah 0,9 persen per tahun menjelang akhir PJP II. Jika kedua sasaran tersebut dapat dicapai maka pendapatan per kapita Indonesia diharapkan akan meningkat menjadi sekitar US\$ 3.800 (berdasarkan US\$ 1993). Pada saat itu ekonomi Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang besar di dunia, dengan ukuran Purchasing Power Parity (PPP) sekitar US\$ 2,0 triliun.

Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk ditargetkan di atas 7 persen dan 1,4 persen rata-rata per tahun. Dengan kedua sasaran ini, pendapatan per kapita pada akhir Repelita VII diharapkan dapat mencapai sekitar US\$ 1.400 (berdasarkan US\$ 1993), atau seki-

tar US\$ 2.000 pada harga yang berlaku. Pada saat itu ekonomi Indonesia telah dapat digolongkan ke dalam negara industri baru.

Sektor industri akan merupakan penggerak perekonomian. Sektor industri juga makin diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja, secara bertahap menggantikan peran sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan cukup tinggi tersebut, diupayakan makin bersumber pada sumber daya manusia yaitu dari peningkatan produktivitas dan efisiensi, di samping pemanfaatan pertumbuhan tenaga kerja dan modal.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin antara lain pada peningkatan keterampilan, kreativitas, kemampuan teknologi, dan kemampuan manajemen serta kepemimpinan yang efektif dan tepat di samping penyempurnaan dan pembaharuan kelembagaan.

Unsur yang teramat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini adalah pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Di bidang pendidikan, program yang utama adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dimulai sejak awal Repelita VI dan diharapkan sudah tuntas pada akhir Repelita VII, selambat-lambatnya pada Repelita VIII.

Mutu pendidikan juga terus meningkat dan pendidikan sudah harus mengarah dan tanggap terhadap kebutuhan dunia usaha setempat.

Pada akhir PJP II, seluruh angkatan kerja sudah berpendidikan sekurang-kurangnya 9 tahun dan sebagian besar sudah berpendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun. Angkatan kerja sarjana akan semakin banyak. Tingkat keterampilan sudah makin tinggi sehingga produktivitas tenaga kerja tidak akan berbeda jauh dari negara-negara yang saat ini termasuk kelompok industri baru.

Sasaran di bidang kesehatan adalah mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat sehingga dapat menaikkan usia harapan hidup menjadi 66,3 pada akhir Repelita VII dan 70,6 tahun pada akhir PJP II dari 62,7 tahun pada akhir PJP I. Tingkat kematian bayi per seribu kelahiran menjadi 43 pada akhir Repelita VII dan 26 pada akhir PJP II.

Seiring dengan proses transformasi produksi, struktur tenaga kerja akan berubah sangat cepat yaitu dari tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa. Pada akhir Repelita VII tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian akan turun menjadi sekitar 39 persen dan sisanya di luar sektor pertanian. Sedangkan pada akhir PJP II, tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian diharapkan hanya tinggal sekitar 27 - 28 persen dan sisanya di luar sektor pertanian. Hal ini dimungkinkan dengan meningkatnya kemampuan tenaga kerja baik secara profesional maupun kualifikasi teknisnya. Proses ini akan mendorong terbentuknya kelas menengah yang makin kuat dan akan menjadi tulang punggung perekonomian yang handal.

Dalam PJP II, lapisan usaha menengah makin kuat yang akan saling mendukung dengan lapisan usaha kecil yang kukuh, dan dengan usaha besar yang diharapkan juga makin luas basisnya.

Di samping itu untuk mendukung kegiatan perekonomian, pembangunan di bidang prasarana di dalam PJP II juga akan ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana ekonomi berupa listrik, jalan, telepon, air, dan pelabuhan. Tersedianya berbagai prasarana ini secara memadai tidak saja akan mendukung kegiatan produksi tetapi juga memperlancar arus distribusi sehingga dapat menekan biaya-biaya ekonomi. Peranan swasta dalam penyediaan prasarana akan makin membesar terutama di daerah-daerah yang kelayakan ekonominya memungkinkan investasi swasta. Dengan demikian investasi pemerintah di bidang prasarana akan makin diarahkan untuk wilayah atau kawasan yang tertinggal dan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat miskin.

Pembangunan nasional tidak saja mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun lebih luas lagi yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas yang mantap dan

dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan bermakna kalau disertai peningkatan nyata dalam kesejahteraan rakyat yang makin adil dan merata.

Masalah kemiskinan absolut diharapkan sebagian besar sudah teratasi pada akhir Repelita VII dan sisanya yang terdapat di kantung-kantung kemiskinan harus diupayakan berakhir tuntas sebelum PJP II berakhir. Dengan demikian upaya pemerataan pembangunan akan merupakan pekerjaan besar dalam PJP II.

Kesenjangan pembangunan antardaerah secara sistematis dan konsisten akan terus dikurangi. Meskipun dalam 25 tahun mendatang kesenjangan ini belum dapat dihilangkan sama sekali, yang dapat diupayakan adalah mencegah agar jurang kesenjangan tidak makin melebar. Sehubungan itu, kawasan terbelakang akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan dan dapat turut maju sebagaimana kawasan lainnya yang telah lebih dahulu berkembang.

Kualitas demokrasi pada akhir PJP II akan makin meningkat sebagai hasil dari peningkatan kualitas lembaga-lembaga sosial politik dan pelakunya. Kehidupan yang makin transparan diharapkan tidak saja terlihat dalam bidang ekonomi namun juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya termasuk di bidang politik.

III. Tantangan-Tantangan Pembangunan

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan wujud masa depan bangsa Indonesia dalam PJP II dan Repelita VII seperti pokok-pokoknya diuraikan di atas bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak tantangan pembangunan harus dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut dapat berasal dari luar atau dari dalam dan dapat bersumber dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dalam Repelita VII mendatang, Indonesia akan memasuki abad ke-21 dimana globalisasi dan proses perubahan akan berlangsung sangat cepat. Dalam era tersebut persaingan antarbangsa akan menjadi makin ketat sehingga peningkatan daya saing merupakan suatu keharusan.

Persiapan sejak dini perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Segala modal yang telah dimiliki, tantangan, peluang, dan kendala harus dapat diidentifikasi secara cermat dan terperinci sehingga strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang harus dilakukan akan dapat dirumuskan sebaik-baiknya.

Tantangan yang pertama adalah di bidang ekonomi sehubungan dengan proses globalisasi. Kurun waktu Repelita VII akan bersamaan dengan diberlakukannya kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2003. Pada tahun 2020, dua tahun setelah berakhirnya PJP II, Kawasan Bebas Perdagangan Asia Pasifik juga akan berlaku.

Ekonomi Indonesia akan makin terintegrasi ke dalam ekonomi ASEAN dan Asia Pasifik dalam jangka panjang. Dengan ditiadakannya perlindungan oleh setiap negara, persaingan dalam kawasan ini akan makin keras. Untuk itu efisiensi ekonomi dan produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan. Terlebih lagi karena persaingan yang akan terjadi terutama adalah antarunit produksi.

Untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, perlu dilanjutkan upaya deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka penyempurnaan lembaga-lembaga ekonomi kita. Dalam kaitan ini, berbagai pungutan yang tidak mempunyai dasar jelas dan akan meningkatkan biaya ekonomi harus ditiadakan.

Produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pada saat ini kualitas SDM yang kita miliki masih berada di bawah negara-negara tetangga yang telah lebih dulu maju. Dengan demikian upaya mengejar ketertinggalan dalam pengembangan sumber daya manusia juga merupakan tantangan agar dapat menciptakan manusia yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Tantangan yang kedua adalah pengangguran dan lapangan kerja. Masalah pengangguran dan

masalah penyediaan lapangan kerja tetap akan dihadapi dalam kurun pembangunan yang akan datang dengan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Repelita-repelita sebelumnya.

Walaupun laju pertumbuhan penduduk Indonesia sudah menurun, namun karena penduduknya besar maka secara absolut tambahan penduduk setiap tahunnya masih besar dan ini akan berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja. Misalnya dalam tahun 1995 jumlah pengangguran terbuka telah meningkat menjadi 5,9 juta orang atau 7,0 persen dari angkatan kerja, dari 2,3 juta orang atau 3,2 persen pada tahun 1990, walaupun pertumbuhan penduduk menurun dari 1,66 persen pada tahun 1990 menjadi 1,60 persen pada tahun 1995. Sedangkan pengangguran terselubung pada periode 1990 - 1995 diperkirakan sekitar 36 persen dari angkatan kerja.

Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka harapan tenaga kerja terhadap pekerjaan yang diinginkan akan semakin tinggi. Ini mendorong angkatan kerja untuk menunggu jenis pekerjaan yang sesuai dengan taraf pendidikannya dan secara absolut ini akan mendorong meningkatnya pengangguran bagi angkatan kerja yang berpendidikan baik SLTA maupun Universitas. Pada tahun 1990, jumlah pengangguran yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebesar 117,4 ribu orang dan meningkat menjadi 404,6 ribu orang pada tahun 1995 atau dari 5,01 persen menjadi 6,85 persen dari pencari kerja.

Selain itu, transformasi ekonomi akan mengakibatkan terjadinya pergeseran angkatan kerja dari sektor yang mempunyai upah yang rendah ke sektor yang mempunyai upah yang lebih tinggi. Salah satu akibatnya adalah adanya urbanisasi yang semakin besar dari angkatan kerja yang ada di perdesaan ke kota-kota besar. Berarti akan ada tantangan untuk penataan wilayah perkotaan, baik secara fisik maupun dari segi ekonomi dan sosial.

Tantangan yang berikutnya adalah masalah kemiskinan. Meskipun jumlahnya terus berkurang, namun laju penurunan penduduk miskin semakin rendah dan lokasinya makin terpusat pada kantong-kantong kemiskinan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan secara mendasar masih merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Masalah kemiskinan ini kita harapkan sudah dapat dituntaskan dalam Repelita VII.

Dalam Repelita VII, bangsa Indonesia sudah memasuki jaman dunia baru yang ditandai dengan keterbukaan dan persaingan yang peluangnya belum tentu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh golongan ekonomi lemah. Dalam keadaan demikian, besar sekali kemungkinan makin melebarnya kesenjangan.

Oleh karena itu, apabila untuk menegakkan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi, maka untuk mengatasi kesenjangan diperlukan intervensi, yakni melindungi dan memberikan kesempatan bagi yang lemah untuk tumbuh.

Erat kaitannya dengan masalah kesenjangan adalah masalah kesempatan berusaha. Kegiatan usaha di Indonesia sebagian besar didominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya sedikit dengan asset yang besar, sedangkan pengusaha kecil yang jumlahnya sangat besar hanya memiliki asset dalam jumlah yang kecil. Sementara itu, lapisan pengusaha menengah belum berkembang secara sehat dan mantap (Data BPS: dalam tahun 1993, jumlah industri kecil yaitu dengan jumlah tenaga kerja di bawah 20 orang sebanyak 2,5 juta pengusaha atau 99,27 persen dengan nilai tambah bruto sekitar Rp 4,0 triliun atau 7,48 persen. Sedangkan industri besar dan sedang berjumlah 18,2 ribu pengusaha atau 0,73 persen dengan nilai tambah bruto sebesar Rp 49,8 triliun atau 92,52 persen dari total nilai tambah bruto).

Struktur dunia usaha yang demikian tidak kukuh, di samping tidak mencerminkan cita-cita demokrasi ekonomi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu sejalan dengan upaya deregulasi dan terbukanya pasar secara luas, harus dikembangkan langkah-langkah membangun usaha menengah dan kecil termasuk koperasi sehingga menjadi kuat. Dalam rangka itu, kemitraan perlu terus ditingkatkan dan diupayakan agar menjadi pola dalam kehidupan ekonomi kita. Mewujudkan hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah, tetapi mutlak harus dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan akan sulit untuk dicapai tanpa

dukungan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Hal-hal yang dengan susah payah dibangun melalui pertumbuhan dan pemerataan dapat dengan mudah hancur karena gangguan stabilitas.

Dalam rangka stabilitas nasional salah satu sisinya adalah stabilitas ekonomi makro. Laju inflasi harus senantiasa diusahakan cukup rendah dan neraca pembayaran harus terpelihara dengan aman. Oleh karena itu, memelihara stabilitas ekonomi tetap merupakan tantangan pembangunan di masa depan.

Erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi adalah stabilitas politik. Dalam Repelita VII, suasana kehidupan politik nasional akan semakin diwarnai oleh upaya untuk lebih meningkatkan kualitas berdemokrasi, iklim keterbukaan, partisipasi kearah perbaikan dan pembaharuan, serta kesadaran akan kemajemukan.

Dengan demikian menjaga stabilitas politik merupakan pekerjaan yang rumit dan memerlukan pendekatan-pendekatan yang "canggih". Oleh karena itu, merupakan tantangan pula untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa, mengembangkan dan memantapkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diselenggarakan secara sehat, dinamis, kreatif, dan efektif.

IV. Kesimpulan : Agenda Pembangunan

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut perlu dipikirkan langkah-langkah yang harus diambil di masa depan, atau dengan kata lain diperlukan suatu agenda pembangunan.

Tantangan globalisasi adalah tantangan utama dalam Repelita VII. Untuk itu dalam bidang ekonomi perlu terus diupayakan penyerasian strategi ekonomi Indonesia dengan keadaan yang sedang berkembang agar bangsa Indonesia diuntungkan. Kuncinya dari segi ekonomi tidak lain adalah membangun daya saing dan memeliharanya agar berkesinambungan.

Daya saing tidak dapat lagi semata-mata ditentukan oleh upah buruh yang rendah dan sumber daya alam yang berlebih akan tetapi lebih ditentukan oleh penguasaan informasi, teknologi, dan keahlian manajerial.

Ini berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diprioritaskan dan ini terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kesemuanya akan bermuara pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dunia usaha akan pertama kali bertarung di pasar bebas. Walaupun disadari bahwa struktur dunia usaha telah kelihatan semakin maju terutama pada usaha-usaha berskala besar, namun struktur lapisan usaha nasional masih belum mantap dan kukuh. Hal ini terutama berkaitan dengan lapisan ekonomi usaha skala kecil (ekonomi rakyat) yang jumlahnya banyak tetapi memiliki aset produktif yang sangat terbatas.

Selama ini saja, lapisan usaha skala kecil sudah jauh tertinggal. Apalagi harus dihadapkan pada persaingan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar. Lapisan ekonomi menengah juga belum berkembang sebagaimana layaknya, yaitu menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Sehubungan itu, segenap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh negara harus ditujukan kearah membangun pertumbuhan yang serasi dengan pemerataan dan keadilan. Kebijakan-kebijaksanaan ekonomi baik makro, sektoral, maupun regional harus secara terpadu mengupayakan agar ekonomi usaha skala kecil dapat secepatnya bangkit dan menjadi kukuh dan mantap.

Berkaitan dengan pengembangan usaha skala kecil, di samping melalui upaya tersebut di atas, juga diperlukan upaya-upaya yang spesifik. Upaya tersebut harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat melalui upaya-upaya pemberdayaan.

Upaya khusus tersebut antara lain adalah: menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan melindungi yang lemah sebagai akibat kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Peningkatan keuntungan bagi dunia usaha tidak saja melalui kemampuan produksi namun juga kemampuan pemasaran. Dari pengalaman negara-negara yang sudah maju dan yang baru masuk dalam tahapan industri dapat ditarik pelajaran bahwa kemampuan berproduksi harus merupakan gerakan terpadu dengan kemampuan menembus pasar.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan pada akhir PJP II tidak saja menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa industri yang kuat tapi juga menjadikan Indonesia menjadi bangsa niaga.

Bangsa yang kuat harus dapat memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya, yaitu potensi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang merata, bukan hanya mutlak untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan berlandaskan kemandirian.

Kemajuan dan kemandirian yang menjadi sasaran pembangunan bangsa Indonesia selain merupakan ukuran kemampuan adalah juga sikap budaya. Globalisasi akan mempengaruhi sistem nilai yang membentuk budaya bangsa. Materi sebagai ukuran keberhasilan dan sikap individualisme yang hidup dikalangan masyarakat barat dapat pula merasuk pula ke dalam budaya kita. Demikian pula nilai-nilai moral yang berbeda dapat menimbulkan benturan-benturan budaya. Oleh karena itu memperkuat ketahanan budaya harus menjadi agenda pembangunan yang pokok pula. Maka masalah budaya menduduki tempat yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan semua bidang lainnya dalam seluruh konsep pembangunan bangsa kita, bahkan adalah yang paling mendasar. Kalau kita berbicara mengenai budaya, ia tidak hanya menyangkut aspek-aspek sosial, tetapi juga budaya ekonomi dan budaya politik.

Apabila berbagai langkah seperti diuraikan di atas berhasil kita laksanakan, maka Insya Allah bangsa Indonesia akan berjalan dengan mantap menuju cita-citanya yaitu bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.